



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/satuan perlu ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA** : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp355.620.088 (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada pihak

lain ...

lain, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2019
TANGGAL 31 JANUARI 2019

DAFTAR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3050104003	Rak Besi	347	16/12/2016	Rak Panjang	1	23.100.000
2	3050105017	Mesin Absensi	49	12/07/2016	FingerSpot	1	2.750.000
3	3050201003	Kursi besi/metal	6755	14/04/2016	Futura Merah	1	407.000
4	3050201003	Kursi besi/metal	6957	01/11/2016	Capri (Kursi Rapat)	1	1.618.888
5	3050201003	Kursi besi/metal	7123	07/08/2017	Indovickers	1	1.602.700
6	3050201005	Sice	322	10/08/2016	Indovickers (1 Dudukan)	1	6.105.000
7	3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	22	22/03/2017	Honey Well MN12CES	1	5.998.000
8	3050205004	Teko Listrik	11	17/11/2016	Akebonno	1	946.000
9	3060201010	Facsimile	147	20/04/2016	Panasonic KX-FL 612	1	4.399.000
10	3060201010	Facsimile	148	20/04/2016	Panasonic KX-FL612	1	4.399.000
11	3060201010	Facsimile	154	20/04/2016	Panasonic KX-FL612	1	4.399.000
12	3060201010	Facsimile	155	20/04/2016	Panasonic KX-FL612CX	1	4.399.000
13	3060201010	Facsimile	156	20/04/2016	Panasonic KX-FL 612	1	4.399.000
14	3060201010	Facsimile	158	20/04/2016	Panasonic KX-FL 612	1	4.399.000
15	3060201010	Facsimile	159	20/04/2016	Panasonic KX-FL 612	1	4.399.000
16	3060201010	Facsimile	163	20/04/2016	Panasonic KX-FL 612	1	4.399.000
17	3100102001	P.C unit	2371	20/04/2016	Asus Pro 4320-BE059M	1	15.246.500
18	3100102001	P.C unit	2604	10/04/2017	HP Pro One	1	16.200.000
19	3100102001	P.C unit	2605	10/04/2017	HP Pro One	1	16.200.000
20	3100102003	Note book	896	20/04/2016	Asus X455LA	1	11.938.000

No	Kode	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	3100102003	Note book	906	20/04/2016	Asus X455LA	1	11.938.000
22	3100102003	Note book	908	20/04/2016	Asus X455LA	1	11.938.000
23	3100102003	Note book	921	20/04/2016	Asus X455LA	1	11.938.000
24	3100102003	Note book	922	20/04/2016	Asus X455LA	1	11.938.000
25	3100102003	Note book	923	20/04/2016	Asus X455LA	1	11.938.000
26	3100102003	Note book	926	20/04/2016	Asus X455LA	1	11.938.000
27	3100102003	Note book	930	20/04/2016	Asus X455LA	1	11.938.000
28	3100102003	Note book	1047	04/10/2017	HP EliteBook	1	20.200.000
29	3100102003	Note book	1054	04/10/2017	HP EliteBook	1	20.200.000
30	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	998	20/04/2016	Canon Imageclass LBP 6780x	1	7.950.000
31	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1031	20/04/2016	Canon LBP7780CX i-Sensys	1	19.750.000
32	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1032	20/04/2016	Canon LBP7780CX	1	19.750.000
33	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1039	20/04/2016	Canon LBP7780CX i-Sensys	1	19.750.000
34	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1041	20/04/2016	Canon LBP7780CX i-Sensys	1	19.750.000
35	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1066	11/10/2016	Canon Maxify MB5070	1	3.700.000
36	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1074	11/10/2016	Canon Maxify MB5070	1	3.700.000
TOTAL						36	355.620.088

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati